



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) TAHUN ANGGARAN 2023

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Capaian indikator kinerja makro Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

Capaian Kinerja dan Laju Kinerja Indikator Kinerja Makro Tahun 2022-2023

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja		Laju Kinerja
			2022	2023	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	84,40	84,86	0,55%
2.	Angka Kemiskinan	%	7,74	7,52	- 2,84%
3.	Angka Pengangguran	%	4,78	4,47	- 6,49%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,09	- 1,17%
5.	Pendapatan per Kapita	Rp (ribu)	47.628,00	53.416,03	12,15%
6.	Ketimpangan Pendapatan	rasio	0,418	0,433	3,59%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024

B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

1. Urusan Pendidikan

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:





**Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2022-2023**

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2022	2023
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93,71%	93,77%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,97%	99,97%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,74%	99,78%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	84,84%	88,14%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Anggaran urusan pendidikan di Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar Rp866.014.411.413,00 dengan realisasi sebesar Rp834.660.631.355,99 (96,38%), dengan program sebagai berikut:

**Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2023**

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	529.818.106.616,00	507.604.511.760,01	95,81%
Program Pengelolaan Pendidikan	335.937.583.797,00	326.824.022.895,98	97,29%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	258.721.000,00	232.096.700,00	89,71%
Jumlah	866.014.411.413,00	834.660.631.355,99	96,38%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Sleman tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Masih ditemui Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sleman yang disebabkan oleh permasalahan pola pikir, sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan sekitar anak. ATS yang dimaksud yaitu:
 - a) Anak putus sekolah;
 - b) Anak lulus SD/SMP sederajat tapi tidak melanjutkan SMP/SMA sederajat;
 - c) Anak yang sama sekali belum pernah sekolah.

Jumlah keseluruhan ATS usia 7-18 tahun berdasarkan kegiatan pendataan di bawah koordinasi Satgas Anak Putus Sekolah terdapat sejumlah 436 anak, 330 diantaranya laki-laki dan 106 perempuan. Kapanewon Prambanan merupakan kapanewon dengan persentase



ATS usia 7-18 tahun tertinggi yaitu sebesar 0,48% dari total jumlah anak usia sekolah atau sebanyak 47 anak dari total 9.849 anak. Jumlah ATS tersebut juga merupakan jumlah ATS paling banyak di setiap Kapanewon berdampingan dengan Kapanewon Gamping yang juga memiliki jumlah ATS sebanyak 47 namun secara persentase hanya mencapai 0,28%. Posisi kedua ATS tertinggi justru berada di Kapanewon Turi dengan persentase ATS sebesar 0,45% atau sebanyak 29 anak dari total 6.488 anak usia 7-18 tahun. Sebaliknya, Kapanewon Depok merupakan Kapanewon dengan persentase ATS usia 7-18 tahun terendah yaitu sebesar 0,12% atau sebanyak 26 anak dari total 21.741 anak usia 7-18 tahun di wilayah tersebut. Jumlah ATS paling sedikit berada pada Kapanewon Minggir dan Moyudan dengan jumlah ATS sejumlah masing-masing 8 dan 9 anak.

- 2) Kualitas guru dari sisi profesionalisme masih di bawah 80%. Bahkan kualitas guru ASN yang telah memiliki ijazah S1 dan bersertifikat pendidik baru mencapai 76,26%. Salah satu permasalahan utamanya yaitu kuota perolehan sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari pusat sangat terbatas. Bahkan meski Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran PPG mandiri di tahun 2022 lalu, pihak pusat tidak memberikan kuota karena keterbatasan jumlah pengajar PPG di tingkat pusat.
- 3) Beban tugas tambahan bagi beberapa guru selain tugas pokok mengajar seperti diantaranya tugas menjadi operator Dapodik, tugas menjadi bendahara/pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau tugas menjadi pengelola barang/aset sekolah. Hal ini menjadi beban bagi guru karena berdampak pada jam mengajar guru jika mendapat undangan Bimbingan Teknis dari Dinas dan juga berdampak pada kurangnya waktu pengembangan mandiri diri guru di luar jam mengajar karena harus menyelesaikan tugas tambahan yang dimaksud.
- 4) Adanya stagnansi kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SD, serta penurunan kemampuan literasi dan stagnansi numerasi peserta didik SMP pada tahun 2022 dibandingkan pencapaian tahun 2021. Hal



ini menjadi permasalahan dikarenakan capaian Kabupaten/Kota serupa di tingkat nasional mengalami rata-rata kenaikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SD dan SMP. Hal ini mengindikasikan masih perlunya penguatan kompetensi mengajar literasi dan numerasi bagi guru SD dan SMP agar kompetensi guru meningkat dan mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik SD dan SMP.

2. Urusan Kesehatan

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Tahun 2022-2023

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2022	2023
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,293%	3,04%
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	71,42%	100%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	87,27%	98,64%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	91,95%	100,08%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,95%	97,76%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	93,15%	76,42%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,02%	98,91%
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	62,63%	64,91%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55,84%	76,06%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,71%	97,54%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,79%	104,93%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98,40%	100,72%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	213,19%	111,93%
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	130,16%	152,09%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Anggaran urusan kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar Rp560.498.132.169,00 dengan realisasi sebesar Rp512.215.274.903,69 (91,39%), dengan program sebagai berikut:





**Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Tahun 2023**

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	430.811.872.084,00	387.557.876.174,56	89,96%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	122.608.487.956,00	118.003.982.569,43	96,24%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.929.993.629,00	2.752.126.386,00	93,93%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.020.653.100,00	837.125.256,90	82,02%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.127.125.400,00	3.064.164.516,80	97,99%
Jumlah	560.498.132.169,00	512.215.274.903,69	91,39%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum membudaya di berbagai tatanan
- 2) Pemberdayaan kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) melemah ditengah tuntutan kader yang kompeten dan melek teknologi
- 3) Pelayanan terhadap usia produktif usia 15 - 59 tahun belum optimal karena
 - a) sistem informasi untuk pencatatan kegiatan skrining PTM belum optimal.
 - b) Belum ada data output hasil skrining yang telah mendapat penanganan tindak lanjut. (Berapa yang ditemukan melebihi standar normal. dan dirujuk ke fasyankes utk mendapat pelayanan kesehatan lebih lanjut).
 - c) Pelaksanaan kegiatan skrining sebagian besar dilakukan saat jam kerja puskesmas. ataupun terintegrasi oleh posyandu di pagi hari sementara. sasaran usia produktif lebih banyak berada di lokasi sekolah/kampus/kerja.
- 4) Pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi & DM masih terjadi underreporting data dari faskes jejaring. dan sistem dukungan pengobatan penyakit kronis yang ada belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan penderita untuk menjalani pengobatan teratur di fasilitas kesehatan.





- 5) Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ODGJ berat telah tercapai namun masih ditemukan belum optimalnya dukungan keluarga untuk mendapatkan akses pelayanan. adanya stigma terhadap ODGJ berat.
- 6) Belum tercapainya target pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan (SPA) sesuai standar >60 % sebesar 83,58%
- 7) Dalam pelaksanaannya SES belum optimal, karena:
 - a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia petugas SES yang melaksanakan ketugasan dengan 2 shift
 - b) Anggaran kegiatan PSC SES telah memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan ketugasan PSC SES
 - c) Kurang representatif nya Posko PSC SES
 - d) Belum efektifnya koordinasi dan komunikasi antar fasilitas kesehatan
 - e) Rendahnya partisipasi jejaring dalam pengajuan klaim penanganan kegawatdaruratan
 - f) Belum terbangunnya komitmen petugas pelaksana puskesmas
 - g) Petugas belum memahami tupoksi serta SOP secara menyeluruh
 - h) Kurangnya sosialisasi tentang PSC SES kepada masyarakat
- 8) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit) tahun 2023 RSUD Prambanan belum tercapai; Data ASPAK hanya mengalami kenaikan sebesar 0,52
- 9) Bangunan IGD RSUD Sleman yang terletak di lantai 2 Gedung Pelayanan Terpadu dengan akses jalan menuju IGD menanjak sehingga beresiko Kejadian Tidak Diinginkan (KTD).
 - a) Sistem rujukan berjenjang BPJS menyebabkan pasien tidak bisa mengakses langsung pelayanan RSUD Sleman.
 - b) Keterbatasan jumlah Sumber Daya (Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia) dalam menunjang pengembangan pelayanan di RSUD Sleman dan layanan prioritas unggulan sesuai program transformasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI.
 - c) Keterbatasan ruang haemodialisa yang tidak sebanding dengan jumlah pasien HD yang harus dilayani.





- 10) Perbedaan persepsi yang salah tentang AFP masih menjadi hambatan terbesar.
- 11) Adanya kelompok anti vaksin yang menolak melakukan vaksin
- 12) Masyarakat masih ada yang enggan melaporkan apabila terjadi KLB, sebagian besar hal ini terjadi karena kurang paham di masyarakat bahwa harus segera melapor
- 13) Pengawasan terhadap sarana pengelolaan obat/alkes baru dapat dilakukan terhadap salah satu sasaran yaitu apotek, sedangkan terhadap sarana pengelolaan obat/alkes yang lain seperti rumah sakit, klinik, toko obat, toko/distributor alkes, belum dapat terjangkau karena keterbatasan SDM.
- 14) Setelah pandemi, merebaknya pelaku usaha makanan jajanan dan pangan siap saji, sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan pengawasan terhadap pengelolaan makanan, masih belum dapat mencakup keseluruhan pelaku usaha pangan, tetapi masih bersifat sampling per puskesmas / kapanewon
- 15) Meningkatnya masalah berat badan kurang dan sangat kurang pada balita.
- 16) Masih terbatasnya Puskesmas PONEK dan RS PONEK
 - a) Kurangnya jumlah pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK)
 - b) Ketimpangan distribusi tenaga antar Puskesmas .
 - c) Belum semua PNS mengisikan data kepegawaiannya di aplikasi SIMPEG secara lengkap.
 - d) Masih adanya data domisili PNS yang belum sesuai data terbaru, sehingga mempengaruhi penataan pegawai.
 - e) Adanya larangan pengangkatan tenaga kesehatan Non-ASN.
- 17) Masih adanya penyakit menular, sehingga perlu internalisasi masif PHBS yang melibatkan kader lintas sektor.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Capaian Kinerja Outcome





Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2022-2023**

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2022	2023
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	100,00%	0
2.	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100,00%	0
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	32,90%	33,05%
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	10,23%	100%
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	85,57%
6.	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100,00%	100%
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,03%	82,20%
8.	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	88,02%	84,84%
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2024
Dinas Lingkungan Hidup, 2024

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar Rp232.632.114.134,00 dengan realisasi sebesar Rp228.436.856.506,86 (98,20%), dengan program sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.949.119.877,00	22.991.848.424,00	96,00%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	42.709.680.108,00	41.443.541.730,50	97,04
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.303.696.825,00	10.224.024.024,00	99,23%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	13.570.915.303,00	13.463.379.866,00	99,21%
Program Pengembangan Permukiman	16.755.256.200,00	16.701.323.845,00	99,68%
Program Penataan Bangunan Gedung	56.297.182.322,00	56.048.321.043,50	99,56%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	494.344.600,00	490.079.515,00	99,14%
Program Penyelenggaraan Jalan	52.804.413.241,00	51.513.167.159,50	97,55%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	633.113.000,00	592.794.678,00	93,63%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.197.225.475,00	1.183.214.457,00	98,83%





Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	799.854.770,00	731.329.524,00	91,43%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	13.117.312.413,00	13.053.832.240,36	99,52%
Jumlah	232.632.114.134,00	228.436.856.506,86	98,20%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2024
Dinas Lingkungan Hidup, 2024

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Sleman tahun 2023, sebagai berikut:

1) Pada pelayanan air minum:

- a) Pendataan sumber air baku untuk jenis pelayanan SPAM perkotaan sudah lengkap dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, sehingga dapat diketahui jumlah kapasitas intake, kapasitas produksi dan idle capacity, namun pendataan kondisi SPAM jaringan perpipaan perdesaan belum selesai pendataan. Sehingga belum dapat diketahui jumlah kapasitas sumber air/produksi produksi dan idle capacity. Pendataan kondisi SPAM jaringan perpipaan perdesaan dikelola oleh kelompok PAMDES (Pengelolaan Air Minum Perdesaan) ditingkat dusun, maka data belum terpusat ditingkat desa.
- b) Kurang maksimal dalam penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dikarenakan kurang optimalnya data dasar kapasitas air baku yang dimiliki, kemudian kelengkapan data dalam penghitungan kebutuhan juga belum maksimal misalnya data kondisi ekonomi MBR atau non MBR, jarak sumber air ke penampung/ septictank juga belum ada.
- c) Hingga tahun 2023 Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman melaksanakan pemenuhan untuk pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari melalui SPAM jaringan perpipaan dikarenakan kebutuhan pelayanan terhadap akses air sangat tinggi namun terkendala dengan minimnya anggaran





sehingga kurang optimal dalam pemenuhan pemasangan sambungan rumah akan air minum.

- d) Pelaksanaan pemenuhan mengacu pada target yang berasal dari DCPM (Daftar Calon Penerima Manfaat) sambungan SR yang akan dipasang, namun angka target terkadang berubah dikarenakan ketidaklolosan calon penerima serta memprioritaskan sambungan rumah yang dekat dengan area Jaringan Distribusi Utama (JDU) atau Jaringan Distribusi Bagi (JDB). Kemudian dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan jaringan distribusi berdampingan dengan pekerjaan Pembangunan transmisi dan reservoir utama yang dikerjakan oleh BPPW DIY sehingga pekerjaan dilokasi yang sama membuat susah dikerjakan yang mempengaruhi progres capaian pekerjaan. Masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air minum dengan model jaringan perpipaan sehingga belum dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan air minum dengan model bukan jaringan perpipaan.

2) Pada pengelolaan air limbah domestic

- a) Permasalahan pendataan penyambungan jaringan air limbah secara kolektif dimulai dari tingkat dasar yaitu Rumah tangga, koordinasi dengan RT, RW dan Dukuh. Dari hasil pendataan kemudian dilakukan survey untuk menentukan kriteria kelayakan apakah sudah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan. Kendala yang dihadapi ada beberapa warga yang ingin menyambung tetapi elevasi tidak mendukung atau karena galian yang terlalu panjang sehingga warga menolak untuk tanahnya dibongkar, selain itu Hibah Program Air limbah terpusat dari Kementerian PUPR biasanya hanya menyasar rumah tangga, sedangkan toko, tempat usaha, komersil dan pondokan tidak bisa dimasukkan program sehingga harus menyambung mandiri. Sedangkan untuk penyambungan mandiri masih terkendala di sistem.
- b) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar belum maksimal dikarenakan belum optimalnya data dasar air limbah yang



belum layak atau layak tetapi belum aman. Kelengkapan data juga belum maksimal terkait daftar calon penerima manfaat(DCPM) dengan status MBR dan Non MBR, kepemilikan jamban dan septictank sesuai SNI serta ketersediaan air bersih yang dimiliki DCPM.

- c) Hingga tahun 2023 Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pemenuhan untuk pelayanan dasar penyediaan Pelayanan Pengolahanair limbah domestik melalui Pembangunan SPALD-S Skala Individu dan SPALD-T Skala Permukiman dikarenakan kebutuhan pelayanan terhadap akses air limbah yang layak dan aman sangat tinggi namun terkendala dengan minimnya anggaran sehingga kurang optimal dalam pemenuhan pemasangan sambungan rumah air limbah domestik.
- d) Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses sanitasi layak dan aman menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Tangki septik yang belum standar SNI atau belum kedap dan Tangki septik yang belum pernah melakukan penyedotan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera terselesaikan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2023

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2022	2023
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00%	0
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	100,00%	100
3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	18,50%	22,98%
4.	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,71%	2,31%
5.	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	97,62%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024



b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Anggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar Rp25.979.368.188,00 dengan realisasi sebesar Rp25.607.577.827,00 (98,57%), dengan program sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pengembangan Perumahan	3.160.725.000,00	3.096.146.183,00	97,96%
Program Kawasan Permukiman	17.476.841.000,00	17.213.608.693,00	98,49%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.341.802.188,00	5.297.822.951,00	99,18%
Jumlah	25.979.368.188,00	R5.607.577.827,00	98,57%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Pada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
 - a) Pengumpulan data belum semuanya terdata, namun sudah melakukan identifikasi rumah dilokasi rawan bencana kabupaten untuk wilayah Kabupaten Sleman rawan bencana terbagi dua yaitu rawan bencana karena erupsi gunung Merapi dan tanah longsor. Tidak hanya itu, Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman telah melakukan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi bagi korban bencana apabila terjadi bencana. Hingga tahun 2023 Kabupaten Sleman tidak terjadi bencana skala besar, sehingga untuk pengumpulan data rumah yang terkena bencana tidak ada atau tidak dilakukan.
 - b) Kabupaten Sleman hingga tahun 2023 tidak terjadi bencana berskala besar yang ditetapkan oleh Bupati, sehingga untuk pemenuhan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kesulitan untuk menentukan target yang akan





- dicapai. Kemudian untuk penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi yang terkena bencana juga kesulitan dikarenakan tidak terjadi bencana.
- c) Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena bencana dengan merehabilitasi atau pembangunan Kembali atau penyediaan rumah relokasi atau bantuan akses rumah sewa layak huni tidak dilaksanakan dikarenakan tidak terjadi bencana.
 - d) Kesulitan dalam merinci pelaksanaan pemenuhan rumah layak huni yang terkena bencana dikarenakan tidak terjadi bencana hingga tahun 2023.
- 2) Pada fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
- a) Untuk identifikasi perumahan dilokasi yang menimbulkan bahaya sudah dilakukan identifikasi hanya saja baru pendataan rumah yang berada dilokasi sempadan rel kereta api, daerah rawan bencana alam dan permukiman kumuh saja, masih perlu dilakukan pendataan yang lain misalnya rumah didaerah yang menimbulkan bahaya daerah sempadan Sungai, daerah dekat SUTET dan kolong jembatan. Kemudian untuk pengidentifikasian perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman juga belum dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran dan waktu.
 - b) Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota tahun 2023 tidak ada kendala namun belum optimal dalam menghitung kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program relokasi pemerintah kabupaten/kota.
 - c) Rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah tahun 2023 hanya berfokus pada fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan pada program pemerintah daerah dalam upaya pengentasan daerah



kawasan kumuh dibawah 10 hektar. Dalam hal ini sumber pembiayaan untuk pemenuhan hanya memakai sumber APBD, belum mengupayakan dengan sumber anggaran lain seperti DAK dan lainnya sehingga besar kemungkinan apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan lebih banyak kedepannya, pemerintah daerah akan terbebani biaya untuk pemenuhannya.

- d) Meskipun telah memiliki data rumah yang berlokasi menimbulkan bahaya seperti halnya rumah yang berada pada sempadan rel kereta api, rumah dilokasi permukiman kumuh dan rumah yang berlokasi didaerah rawan bencana, tidak semua dijadikan target untuk dilayani secara optimal dengan program relokasi pemerintah daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, untuk rumah yang terdampak relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2023 hanya berfokus pada rumah yang berlokasi didaerah permukiman kumuh dibawah 10 hektar.

5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022-2023

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2022	2023
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100,00%	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	37,00%	52,63%
3.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100,00%	100%
4.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100,00%	100%
5.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%	100%
6.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	89,65%	83,43%
7.	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	89,66%	11,19 menit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat





Anggaran urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar Rp33.621.089.069,00 realisasi sebesar Rp31.515.095.521,23 (93,74%), dengan program sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.068.416.106,00	14.041.172.442,00	93,18%
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.164.452.199,00	2.949.992.951,00	93,22%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	1.564.223.820,00	1.457.930.398,00	93,20%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.617.414.485,00	6.412.887.465,79	96,91%
Program Penanggulangan Bencana	7.206.582.459,00	6.653.112.264,44	92,32%
Jumlah	33.621.089.069,00	31.515.095.521,23	93,74%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Distribusi kewenangan pengampu peraturan daerah ke beberapa perangkat daerah yang belum optimal pada aspek koordinasi, kepastian tata cara pelaksanaan pengawasan dan pembinaan termasuk penjujukan sanksi, aspek pengawasan dan pembinaan dengan aspek penindakan masih bias, perangkat daerah pengampu perda belum memberdayakan PPNS yang dimiliki secara optimal.
- 2) Ketugasan dan fungsi PPNS yang belum berjalan optimal disebabkan karena kurangnya fasilitas infrastruktur (sekretariat) PPNS dan administratornya, kurangnya instrument yang mendukung kesejahteraan PPNS, serta jumlah PPNS yang ada belum memadai dibandingkan dengan jumlah Perda bersanksi yang harus ditegakkan.
- 3) Jumlah anggota Polisi Pamong Praja belum ideal, sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka idealnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman ada 251 orang, sedangkan jumlah Polisi Pamong





Praja yang sekarang 177 orang terdiri dari 90 PNS DAN 87 NON PNS (masih kurang 74 orang)

- 4) Kurangnya Sarpras (armada penjangkauan dan alat komunikasi/HT dan Repiter.
- 5) Rasio jumlah anggota linmas belum ideal. Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 disebutkan dalam lampiran bahwa 1 RT=1 Linmas, sehingga untuk Kabupaten Sleman dibutuhkan Linmas 7.414 personil, sedangkan jumlah yang ada saat ini, yaitu 7.117 orang. Rasio anggota linmas per RT tahun 2023 sebesar 0,98 yaitu jumlah Linmas 7.117 dibagi jumlah RT 7.414 artinya belum setiap RT belum memiliki anggota linmas.
- 6) Keanggotaan linmas didominasi oleh anggota yang berusia 50 tahun (55%), sedangkan usia 65 tahun (23%). Hal ini tentunya semakin kesana akan ada banyak linmas yang purna tugas dan seharusnya digantikan dengan yang lebih muda.
- 7) Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Kejadian Kebakaran di Wilayah WMK, Respons Time masih bisa terpenuhi, tetapi di luar WMK radius 7,5 KM dari Posko Induk dan Godean tidak bisa terpenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit.
- 8) Belum terbentuknya Satlakar; di setiap Kalurahan/Padukuhan.

6. Urusan Sosial

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2022-2023

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	
		2022	2023
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	83,72%	100,00%
2.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Sosial, 2024



b. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Sosial

Anggaran urusan sosial di Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar Rp38.391.216.138,00 realisasi sebesar Rp34.846.895.876,05 (90,77%), dengan program sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.675.700.938,00	6.143.759.307,78	92,03%
Program Pemberdayaan Sosial	2.048.463.500,00	1.965.543.397,84	95,95%
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9.999.900,00	0,00	0,00%
Program Rehabilitasi Sosial	13.126.971.650,00	11.767.094.968,36	89,64%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	15.525.942.900,00	13.983.491.302,07	90,07%
Program Penanganan Bencana	969.007.250,00	952.781.900,00	98,33%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.130.000,00	34.225.000,00	97,42%
Jumlah	38.391.216.138,00	34.846.895.876,05	90,77%

Sumber: Dinas Sosial, 2024

c. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial di Kabupaten Sleman tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Komposisi penduduk lanjut usia yang tinggi di Kabupaten Sleman berpotensi menimbulkan permasalahan sosial di masa depan. Saat ini, Sleman menjadi wilayah dengan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2010, UHH penduduk Sleman mencapai 74,43 tahun dan meningkat menjadi 75,00 pada tahun 2022. Hal ini menjadikan komposisi penduduk lanjut usia di Kabupaten Sleman semakin meningkat dengan rata-rata peningkatan 3,19% selama periode tahun 2010-2020. Peningkatan komposisi penduduk lanjut usia diperkirakan oleh Badan Pusat Statistik akan terus terjadi peningkatan pesat hingga tahun 2045.
- 2) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman terus mengalami penurunan selama 20 tahun terakhir, namun mengalami tren perlambatan. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan sebesar 10,70% dan menurun menjadi 7,74% pada tahun 2022. Rata-rata penurunan tingkat kemiskinan selama periode 2010–2015 sebesar 0,54%, sedangkan selama periode 2016–2022 hanya sebesar 0,07%. Hal ini menunjukkan bahwa



penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman semakin mengalami perlambatan.

- 3) Terdapat beberapa sumber data kemiskinan yang berbeda-beda sehingga mempersulit penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Beberapa sumber data kemiskinan yang tersedia, antara lain data terpadu kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial), data kemiskinan ekstrem (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), data keluarga miskin dan keluarga rentan miskin (Pemerintah Kabupaten Sleman), dan data register sosial ekonomi (Badan Pusat Statistik).
- 4) Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan di Sleman. Faktor yang sulit dikendalikan yang disinyalir sebagai penyebab ketimpangan pendapatan, yakni adanya faktor migrasi masuk penduduk berpenghasilan menengah atas serta laju peningkatan pendapatan masyarakat golongan bawah yang tidak secepat laju peningkatan pendapatan masyarakat golongan menengah atas. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sleman pada tahun 2022 yang diukur dengan menggunakan metode rasio gini menunjukkan angka 0,425, berada di atas rasio gini nasional (0,381).
- 5) Peran tim penanggulangan kemiskinan (TPK) di tingkat kapanewon dan kalurahan belum optimal. Saat ini TPK sudah terbentuk di 17 kapanewon dan 86 kalurahan, namun belum ada regulasi yang mengatur dukungan anggaran penanggulangan kemiskinan di Kapanewon dan Kalurahan.
- 6) Masih ada persoalan terkait intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik antar kelompok, penderita HIV AIDS, hiburan malam, prostitusi, ketimpangan digital, LGBT dan kelompok marjinal lainnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi tren peningkatan jumlah kelompok ini.

C. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Kabupaten Sleman berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,69 dan status kinerja SEDANG.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Kabupaten Sleman berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,1895 dan status kinerja SEDANG.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Nomor 3A/LHP/XVII.YOG/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024 Kabupaten Sleman berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023.

D. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Unadited) Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Kabupaten Sleman Tahun 2023 mencapai sebesar Rp3.083.612.992.324,47 dari anggaran sebesar Rp3.020.272.439.303,00 (102,10%) dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 mencapai Rp3.113.022.550.097,10 dari anggaran sebesar Rp3.281.307.765.874,00 (94,87%).

Secara rinci, rincian realiasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.088.934.414.744,00	1.130.157.860.240,59	103,79
5.1.1.1.a	Pendapatan Pajak Daerah	782.223.000.000,00	833.220.962.563,00	106,52
5.1.1.1.b	Pendapatan Retribusi Daerah	37.979.266.150,00	41.791.670.858,00	110,04
5.1.1.1.c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	39.811.758.078,00	38.698.020.699,57	97,20
5.1.1.1.d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	228.920.390.516,00	216.447.206.120,02	94,55
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	1.921.093.886.559,00	1.943.930.482.278,88	101,19
5.1.1.2.a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.382.743.243.488,00	1.400.012.073.781,00	101,25
5.1.1.2.a.1	Dana Bagi Hasil	56.925.750.896,00	63.146.898.548,00	110,93
5.1.1.2.a.2	Dana Alokasi Umum	958.373.327.000,00	971.708.817.535,00	101,39
5.1.1.2.a.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	24.540.261.000,00	23.251.738.208,00	94,75
5.1.1.2.a.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	342.903.904.592,00	341.904.619.490,00	99,71
5.1.1.2.b	Pendapatan Transfer	173.011.042.000,00	172.797.268.500,00	99,88



Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Pemerintah Pusat - Lainnya			
5.1.1.2.b.1	Dana Insentif Daerah	48.593.705.000,00	48.593.705.000,00	100,00
5.1.1.2.b.2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.b.3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.b.4	Dana Desa	124.417.337.000,00	124.417.337.000,00	99,83
5.1.1.2.c	Pendapatan Transfer Antar Daerah	365.339.601.071,00	371.121.139.997,88	101,58
5.1.1.2.c.1	Pendapatan Bagi Hasil	287.856.631.411,00	294.692.668.839,00	102,37
5.1.1.2.c.2	Bantuan Keuangan	77.482.969.660,00	76.428.471.158,88	98,64
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.244.138.000,00	9.524.649.805,00	92,98
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	10.244.138.000,00	9.524.649.805,00	92,98
5.1.1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	3.020.272.439.303,00	3.083.612.992.324,47	102,10

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.2.1	Belanja Operasi	2.421.326.371.984,00	2.284.950.049.755,68	94,37
5.1.2.1.a	Belanja Pegawai	1.136.131.274.687,00	1.069.357.083.000,06	94,12
5.1.2.1.n	Belanja Barang dan Jasa	1.015.306.812.178,00	950.844.478.030,46	93,65
5.1.2.1.c	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.d	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.e	Belanja Hibah	230.226.325.037,00	227.748.527.105,96	98,92
5.1.2.1.f	Belanja Bantuan Sosial	39.661.960.082,00	36.999.961.619,20	93,29
5.1.2.2.	Belanja Modal	365.865.211.358,00	348.550.533.516,42	95,27
5.1.2.2.a	Belanja Modal Tanah	2.114.059.145,00	888.335.348,00	42,02
5.1.2.2.b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.918.055.691,00	76.719.104.313,63	90,34
5.1.2.2.c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.606.763.355,00	130.087.209.554,46	97,37
5.1.2.2.d	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	133.957.122.317,00	132.253.753.612,33	98,73
5.1.2.2.e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.159.946.850,00	7.911.292.566,00	77,87
5.1.2.2.f	Belanja Modal Aset Lainnya	1.109.264.000,00	690.838.122,00	62,28
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	25.063.948.455,00	14.633.735.470,00	58,39
5.1.2.3.a	Belanja Tak Terduga	25.063.948.455,00	14.633.735.470,00	58,39
5.1.2.4	Belanja Transfer	469.052.234.077,00	464.888.231.355,00	99,11
5.1.2.4.a	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	83.793.804.407,00	80.340.459.980,00	95,88
5.1.2.4.b	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000,00	168.105.000,00	98,89
5.1.2.4.c	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	131.696.000,00	123.923.420,00	94,10
5.1.2.4.d	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	384.956.733.670,00	384.255.742.955,00	99,82
	Jumlah Pendapatan	3.281.307.765.874,00	3.113.022.550.097,10	94,87

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2024



E. Inovasi Daerah

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Tahun 2023, Kabupaten Sleman memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

Inovasi Daerah Tahun 2023

NO	NAMA INOVASI	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN MULAI PENERAPAN
1	2	3	4
1.	bang Komandan (Aplikasi Pengembangan Kompetensi ASN di Kabupaten Sleman)	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	2023
2.	Aplikasi Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP	Inspektorat	2023
3.	Aplikasi Penilaian Mandiri Zona Integritas	Inspektorat	2023
4.	Beeswax Wrap dengan Tambahan Jeruk Nipis (Citrus Aurantiifolia) sebagai Inovasi Pengurangan Sampah	SMP N 1 Ngemplak	2023
5.	BerADAB (Berikan Aku Dokumen Ambil Berkas)	Kapanewon Ngemplak	2023
6.	Laras Duri Baja (Layanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Bagi Pelajar di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman)	Kapanewon Kalasan	2023
7.	CAKRADATA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2023
8.	Dashboard Executive Information	Dinas Komunikasi dan Informatika	2023
9.	Direktori Budaya Kabupaten Sleman	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	2023
10.	DLC (Digital Literacy Corner	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2023
11.	E-Pohon Sebuah Cara Literasi Digital yang Menyenangkan untuk Mengenal Pohon dan Tanaman Khas Daerah di Lingkungan SMP Negeri 2 Ngemplak	SMP Negeri 2 Ngemplak	2023
12.	Gamping Cantas	Kapanewon Gamping	2023
13.	Gummy Sour Bomb Menambah Konsentrasi dan Upaya Meningkatkan Asupan Sayur di Lingkungan Sekolah	SMP Global Islamic School 3 Yogyakarta	2023
14.	KaKa Antar	Kapanewon Minggir	2023
15.	Kendi Prambanan (Katering Diet RSUD Prambanan)	Dinas Kesehatan (RSUD Prambanan)	2023
16.	Kran Otomatis Pembersih Ammonia	SMP N 1 Turi	2023
17.	Pak Maman (Pelacakan Permohonan dan Aduan secara Mandiri)	Dinas Sosial	2023
18.	Peluk Mas Lurah (Pelayanan Administrasi Kependudukan Masyarakat oleh Kapanewon Berbah di Kalurahan)	Kapanewon Berbah	2023
19.	Pemanfaatan Media Digital E- Religion Sebagai Sarana Pembinaan Keagamaan di SMP Negeri 1 Sleman	SMP N 1 Sleman	2023
20.	Penguatan Mental Korban Bullying Menggunakan Aplikasi SMH (Screening Mental Health)	SMP N 4 Kalasan	2023
21.	Posyanduk (Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2023
22.	SIAP DPM (Aplikasi Dana Penguatan Modal Koperasi)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2023
23.	SIAP PRB (Siap Identifikasi Antar dan Pantau Pasien Program Rujuk Balik)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Tempel II)	2023
24.	SIM Kala BerPancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2023
25.	Sim Tangkas (Sistem Informasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2023



NO	NAMA INOVASI	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN MULAI PENERAPAN
26.	SIPARA (Sistem Informasi Pasar Rakyat)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2023
27	SIPEKA (Sistem Layanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga)	Kapanewon Ngaglik	2023
28.	SIPP BAPAK (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2023
29.	Telemedicine Kesehatan Mental	Dinas Kesehatan	2023

Sleman, 26 Maret 2024

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

